



## Pengembangan Tata Kelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa Sekabupaten Klaten Untuk Mendukung Ketahanan Pangan

Syamsudin<sup>1)</sup>, Minardi<sup>2)</sup>, Nurhadi<sup>3)</sup>, Arifin Eka Pambudi<sup>4)</sup>

Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Babarsari, Yogyakarta, Indonesia  
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Timoho, Yogyakarta, Indonesia  
Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Babarsari, Yogyakarta, Indonesia  
Satudesa, Yogyakarta, Indonesia

[syam@up45.ac.id](mailto:syam@up45.ac.id)<sup>1)</sup>  
[minardi@apmd.ac.id](mailto:minardi@apmd.ac.id)<sup>2)</sup>  
[nurhadi@up45.ac.id](mailto:nurhadi@up45.ac.id)<sup>3)</sup>  
[arifarifin144@gmail.com](mailto:arifarifin144@gmail.com)<sup>4)</sup>

### Abstrak

Lumbung Pangan Masyarakat Desa merupakan pilar utama ketahanan pangan berbasis komunitas lokal. Hal tersebut terkait dengan tantangan perubahan iklim dan tekanan terhadap sistem pertanian tradisional bahwa desa membutuhkan model tata kelola yang inovatif dan terintegrasi untuk menjamin ketersediaan, distribusi, dan akses pangan yang merata. Untuk itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengembangan model tata kelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) untuk mendukung ketahanan pangan di pedesaan. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan penelitian di Desa Joho, Kecamatan Prambanan; Desa Demakijo, Kecamatan Karangnongko; dan Desa Pundungan, Kecamatan Juwiring, ketiga desa tersebut masuk wilayah Kabupaten Klaten. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, wawancara dan *Focus Group Discussion*. Adapun informan Pengelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa, Pengelola Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Pegawai Organisasi Pemerintah Daerah terkait. Adapun analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pengembangan tata kelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas produksi melalui pemanfaatan fasilitas yang ada. Aspek perencanaan telah dilakukan oleh 2 desa yaitu Desa Pundungan dan Desa Demakijo. Perencanaan dilakukan terkait rencana model usaha dan perumusan kebijakan lokal desa tentang ketahanan pangan. Aspek kelembagaan organisasi Lumbung Pangan Masyarakat Desa masih belum dilakukan secara optimal. Aspek pelaksanaan menyangkut proses produksi secara kontinu berupa pembelian padi/gabah dan pengolahan/pengilingan gabah serta pemasaran/penjualan beras oleh Lumbung Pangan Masyarakat Desa telah dilakukan oleh 2 Lumbung Pangan Masyarakat Desa yaitu Lumbung Pangan Masyarakat Desa Joho Kecamatan Prambanan dan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Demakijo Kecamatan Karangnongko. Aspek monitoring dan evaluasi dalam tata kelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa telah dilakukan oleh semua Lumbung Pangan Masyarakat Desa yang ada atau sebanyak 3 Desa yaitu (100%).

**Kata kunci:** Pengembangan, Kabupaten Klaten, Ketahanan Pangan, Lumbung Pangan Masyarakat Desa, Tata Kelola



## Abstract

*Village Community Food Barns are a key pillar of local community-based food security. This is related to the challenges of climate change and pressures on traditional agricultural systems that require villages to have an innovative and integrated governance model to ensure equitable food availability, distribution, and access. Therefore, the purpose of this study is to determine the development of a Village Community Food Barn (LPMD) governance model to support food security in rural areas. This research method is a qualitative study conducted in Joho Village, Prambanan District; Demakijo Village, Karangnongko District; and Pundungan Village, Juwiring District, all three villages are in Klaten Regency. Data collection techniques were carried out through observation, documentation, interviews, and Focus Group Discussions. The informants were Village Community Food Barn Managers, Managers of Farmer Group Associations, Farmer Groups, Women Farmer Groups, Village Heads, Village Consultative Body, Village Officials, and related Regional Government Organization Employees. The data analysis was conducted descriptively. The results of the study indicate that the development of Village Community Food Barn governance can be done by increasing production capacity through the utilization of existing facilities. The planning aspect has been carried out by 2 villages, namely Pundungan Village and Demakijo Village. The planning is carried out related to the business model plan and the formulation of local village policies on food security. The institutional aspect of the Village Community Food Barn organization has not been carried out optimally. The implementation aspect concerns the continuous production process in the form of purchasing rice/grain and processing/milling of grain as well as marketing/selling rice by the Village Community Food Barn has been carried out by 2 Village Community Food Barns, namely the Joho Village Community Food Barn, Prambanan District and the Demakijo Village Community Food Barn, Karangnongko District. The monitoring and evaluation aspects in the governance of the Village Community Food Barn have been carried out by all existing Village Community Food Barns or as many as 3 Villages, namely (100%).*

**Key words:** *Development, Klaten Regency, Food Security, Village Community Food Barn, Governance*

## PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang menjadi fokus pembangunan nasional, terlebih dalam konteks menghadapi dinamika perubahan iklim, gejolak ekonomi global, dan ancaman krisis pangan. Berbagai pihak siap berkolaborasi sebagai upaya mewujudkan Asta Cita atau 8 misi yang diusung Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, terutama dalam bidang ketahanan pangan nasional (Sujoni, 2024). Namun, krisis pangan global akibat konflik, permasalahan ekonomi, perubahan iklim ekstrem dan tingginya harga pupuk melanda berbagai negara pada 2023 (Jawahir, 2024).

Untuk mengatasi masalah tersebut pembangunan sistem ketahanan pangan sangatlah bersifat strategis. Sistem ketahanan pangan merupakan sistem yang terintegrasi mencakup ketersediaan pangan, keterjangkauan dan pemanfaatan konsumsi pangan. Adapun keterjangkauan pangan terkait dengan aspek pengelolaan cadangan pangan (Pangan, 2019). Persoalan pangan tidak hanya tanggung jawab pemerintah namun perlu melibatkan dan memberdayakan masyarakat (Sastratmadja, 2022). Pernyataan ini diperkuat dengan adanya laporan dari *Global Network Against Food Crisis* (GRFC) dan *Food and Agriculture Organization* (FAO). Dari laporan FAO dan GRFC memperkirakan akan adanya krisis pangan selama 50 tahun ke depan, dimulai pada akhir 2019 lalu. Menyebabkan 75 juta pertumbuhan anak terganggu dan 17 juta lainnya terdampak malnutrisi (Lasminingrat, 2020).

Kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat. Kabupaten Klaten sebagai salah satu daerah agraris di Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan daerah maupun nasional melalui optimalisasi peran lumbung pangan masyarakat desa. Penelitian melalui *Analisis Location Quotient* menunjukkan bahwa padi unggul di 14 kecamatan atau 54% wilayah di Kabupaten Klaten; dan Komoditas jagung memiliki nilai efisiensi usaha tani tertinggi menurut *analisis Revenue Cost* (R/C) yakni sebesar 3,22; serta 21 kecamatan atau 81% wilayah di Kabupaten

Klaten memiliki nilai daya dukung lahan pertanian tanaman pangan yang tinggi (DDL $P$ >1); Adapun perhitungan jumlah penduduk optimal (JPO) menunjukkan 22 kecamatan atau 85% wilayah di Kabupaten Klaten berstatus “Aman” karena produksi padi yang ada saat ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan beras penduduk (Lasminingrat, 2020).

Ada 3 desa di Kabupaten Klaten yang telah menjalankan Program Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) yaitu Desa Joho, Desa Demak Ijo dan Desa Pundungan (Bram, 2025). Namun, dalam pelaksanaannya, tata kelola lumbung pangan masyarakat di banyak desa di Kabupaten Klaten masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti lemahnya kelembagaan petani, keterbatasan akses pembiayaan, minimnya pemanfaatan teknologi informasi, serta belum adanya strategi pengembangan yang terstruktur dan berkelanjutan. Lumbung Pangan Masyarakat Desa sesungguhnya bukan hanya tempat penyimpanan hasil pertanian, namun memiliki peran penting sebagai instrumen sosial ekonomi yang mampu menjaga stabilitas ketersediaan pangan, mengantisipasi gejolak harga, serta menjadi sumber daya komunitas dalam menghadapi masa paceklik.

Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi pengembangan tata kelola yang mampu menjawab kompleksitas kebutuhan masyarakat desa, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, akademisi, dan swasta. Penelitian ini menjadi penting karena model pelaksanaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa sebagai salah satu program pemerintah berpotensi mengalami kesenjangan bahkan ketidaksesuaian dengan “tradisi” tata kelola ditingkat lokal desa yang ada. Tata kelola lokal desa yang terkadang informal, kolaboratif, partisipatif dan sarat dengan nilai lokalitas akan berhadapan dengan pendekatan program pemerintah yang formal dan makro namun programatik.

Untuk itu, sejalan program strategis pemerintah, saat ini perlu memetakan kondisi eksisting, mengidentifikasi hambatan utama, serta merumuskan strategi yang aplikatif dan adaptif dalam tata kelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa se-Kabupaten Klaten. Pendekatan ini diharapkan mampu mewujudkan sistem ketahanan pangan lokal yang tangguh dan berdaya saing. Penelitian ini menghadirkan pendekatan yang berbeda dengan studi lainnya dengan mengintegrasikan pendekatan partisipatif dan kolaboratif dalam tata kelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa. Adapun beberapa penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek tata kelola konvensional.

Kebaruan dari penelitian ini adalah pendekatan yang dilakukan adalah untuk merumuskan model pengembangan tata kelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa yang adaptif terhadap kebutuhan lapangan dan tidak hanya sekedar melakukan studi evaluasi program seperti dalam penelitian yang ada. Selain itu, Penelitian ini juga akan memetakan dan membangun kapasitas berbasis kolaborasi *multi stakeholder* (supra desa) seperti kolaborasi untuk Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/SPPG). Jadi penelitian ini akan melengkapi penelitian yang banyak berfokus pada relasi infra desa seperti Lumbung Pangan Masyarakat Desa dengan petani/masyarakat lainnya (Lestari, 2023). Penelitian ini juga sebagai tindak lanjut atas penelitian yang dilakukan oleh pengusul dalam rangka mendukung program penanganan *Stunting*. Program penanganan *Stunting* perlu didukung dengan ketersediaan kecukupan pangan secara memadai (Nurhadi, 2024).

Penelitian ini menempatkan Lumbung Pangan Masyarakat Desa sebagai sistem adaptif dan responsif terhadap pemenuhan kebutuhan pangan khususnya ditingkat lokal seperti mengembangkan manajemen kolaboratif multi pihak seperti pemerintah desa, lembaga desa, swasta, PT, dan lain sebagainya untuk implementasi program ketahanan pangan di desa, program Makan Bergizi Gratis, pengembangan usaha ekonomi Koperasi Desa Merah Putih, Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dalam penguatan ekonomi masyarakat desa. Selain itu, penguatan kapasitas dilakukan melalui kemitraan antar-lintas Lumbung Pangan Masyarakat Desa. Strategi ini belum banyak dikembangkan dalam konteks ketahanan pangan tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Klaten, sehingga memberikan kontribusi baru dalam pengembangan sistem pangan lokal yang tangguh, transparan, dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat teoritis antara lain *Pertama*, kontribusi dalam pengembangan ilmu sosial khususnya administrasi publik, *Kedua*, memperkaya literatur terkait tata kelola ketahanan pangan di lingkungan pedesaan. Adapun manfaat praktis antara lain *Pertama*, sebagai dasar pengembangan kebijakan ketahanan pangan dalam hal tata kelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa, *Kedua*, sebagai referensi bagi Pengelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa dalam pengelolaan program ketahanan pangan, dan *Ketiga*, sebagai informasi bagi masyarakat terkait ketersediaan pangan lokal dalam pemenuhan kebutuhan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah pemeriksaan keabsahan data atas dasar kredibilitas, kebergantungan dan kepastian yang bertujuan untuk menginterpretasikan fenomena dalam studi kasus yang nyata terjadi tanpa manipulasi (Moleong, 2000). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, wawancara dan *Focus Group Discussion*. Adapun informan Pengelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa, Pengelola Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Pegawai Organisasi Pemerintah Daerah terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Tahapan metode penelitian ini dilakukan melalui 2 tahap yaitu Tahap Pertama, tahap kegiatan yang telah dilakukan antara lain persiapan dengan melakukan kajian literatur dan penyusunan kerangka/instrumen penelitian serta observasi/survey awal untuk memetakan tata kelola/manajemen kolaboratif Lumbung Pangan Masyarakat Desa. Sedangkan Tahap Kedua, tahap kegiatan yang akan dikerjakan antara lain tahap pengumpulan data, verifikasi/FGD, pengolahan dan analisis data, penyusunan laporan dan tahap akhir. Dalam tahap FGD (*Forum Group Discussion*) dilakukan beberapa kali, pertama dilakukan di tiga titik lokasi atau desa, yakni Joho, Demakijo dan Pundungan. Diharapkan setiap desa terbuka untuk menyampaikan kondisi Lumbung Desanya masing-masing tanpa merasa ragu maupun takut maupun malu dengan desa lain. Kedua, kemudian diadakan FGD (*Forum Group Discussion*) bersama antara ketiga desa tadi, ditambah mengundang Dinas-dinas terkait dan aktivis pertanian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tata Kelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa di Kabupaten Klaten

Lumbung Pangan Masyarakat Desa di Kabupaten Klaten terdapat di 3 Desa yaitu Desa Joho Kecamatan Prambanan, Desa Demakijo Kecamatan Karangnangka dan Desa Pundungan Kecamatan Juwiring. Keberadaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) di Kabupaten Klaten merupakan kebijakan program pemerintah pusat. Tata Kelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa dilakukan melalui fungsi – fungsi tata Kelola antara lain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Dewasa ini, strategi pemerintah dalam pangan dengan menjadikan pangan mode industry. Terdapat tiga kebijakan pemerintah tentang pangan. peningkatan produksi dan produktifitas melalui subsidi baik input, keuangan maupun bantuan teknis kepada petani, bantuan pangan langsung kepada masyarakat miskin dan intervensi perdagangan pangan melalui stabilisasi harga (Nugraha et al., 2016). Maka dengan adanya Kedaulatan Pangan, bukan sekedar Ketahanan Pangan dibutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda. Perbedaan ini terletak kepada penyusunan perencanaan dan pendekatan pembangunan pangan (Sunarsih; Syahyuti; Wahyuni, Sri; K Sejati, Wahyuning; Azis, 2015). Tahap awal untuk mewujudkan swasembada pangan lebih difokuskan kepada ketersediaan beras, baru setelah itu pengembangan pangan lokal (Sudrajat; Purnama, Ignasius Loyola Setyawan; Wjaya, Heri; Rajab, 2025).

Adapun proses tata kelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) di Kabupaten Klaten berdasarkan data di lapangan dapat ditunjukkan dalam Tabel 1. Sebagai berikut :

Tabel 1. Tata Kelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa di Kabupaten Klaten

No	Aspek	Jumlah	Frekuensi	%	Keterangan
1	Perencanaan	3	2	66 %	Program kerja
2	Kelembagaan	3	1	33 %	Pengelola
3	Pelaksanaan	3	2	66 %	Produksi
4	Monitoring dan Evaluasi	3	3	100 %	Laporan

Sumber : diolah oleh peneliti

Aspek perencanaan telah dilakukan oleh 2 desa yaitu Desa Pundungan dan Desa Demakijo. Perencanaan dilakukan terkait rencana model usaha dan perumusan kebijakan lokal desa tentang ketahanan pangan. Perencanaan model usaha menyangkut produksi dan distribusi produk pertanian Lumbung Pangan Masyarakat Desa. Aspek produksi terkait penyiapan lahan pertanian dan sarana produksi pertanian antara lain benih, pupuk, alat – alat pertanian dan bahan lainnya. Sedangkan aspek distribusi terkait konsumen dan mitra distribusi. Saat ini, konsumen produk LPMD adalah masyarakat umum untuk kebutuhan konsumsi sehari – hari. Selain itu, beberapa lembaga mitra konsumen untuk rumah makan seperti Serba Sambal (SS), Lembaga Suara Muhammadiyah dan Instansi TNI. Adapun mitra distribusi akan dikembangkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Adapun aspek kelembagaan organisasi Lumbung Pangan Masyarakat Desa masih belum dilakukan secara optimal. Hal tersebut dapat ditunjukkan hanya 1 Lumbung Pangan Masyarakat Desa Demakijo yang memiliki kelembagaan yang memadai dengan struktur organisasi dengan tugas yang jelas. Lumbung Pangan Masyarakat Desa lainnya dalam organisasi kelolanya belum memadai. Pengelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa semuanya dikelola oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) setempat dengan mengikutsertakan pihak terkait seperti pemerintah desa sebagai pihak penasehat/pembina.

Adapun aspek pelaksanaan menyangkut proses produksi secara kontinu berupa pembelian padi/gabah dan pengolahan/pengilingan gabah serta pemasaran/penjualan beras oleh Lumbung Pangan Masyarakat Desa telah dilakukan oleh 2 Lumbung Pangan Masyarakat Desa yaitu Lumbung Pangan Masyarakat Desa Joho Kecamatan Prambanan dan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Demakijo Kecamatan Karangnangka. Adapun Lumbung Pangan Masyarakat Desa Pundungan Kecamatan Juwiring belum menjalankan secara kontinu. Kapasitas produksi di setiap Lumbung Pangan Masyarakat Desa beragam hal tersebut disebabkan pasokan dan permintaan produk oleh konsumen yang fluktuatif.

Sedangkan aspek monitoring dan evaluasi dalam tata kelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa telah dilakukan oleh semua Lumbung Pangan Masyarakat Desa yang ada atau sebanyak 3 Desa yaitu (100%). Kegiatan monitoring dan evaluasi Lumbung Pangan Masyarakat Desa dilakukan secara rutin dalam rapat koordinasi Gabungan Kelompok Tani desa setempat yang dihadiri oleh Kelompok Tani yang ada. Koordinasi kelompok tani selain melaporkan dan membahas terkait budidaya produksi pertanian juga menyangkut tata kelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa.

### Faktor Penghambat dan Pendukung Lumbung Pangan Masyarakat Desa

Kinerja program Lumbung Pangan Masyarakat Desa di Kabupaten Klaten bervariasi. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal yang ada. Kondisi internal terkait ketersediaan sumber daya antara lain sumber dana, sumber daya manusia, sarana prasarana dan peraturan/regulasi yang ada. Sedangkan kondisi eksternal terkait situasi ekonomi, politik, sosial, budaya dan teknologi. Adapun analisis kondisi internal Lumbung Pangan Masyarakat Desa dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2. Kondisi Internal Lumbung Pangan Masyarakat Desa di Kabupaten Klaten

Aspek	Desa	LPMD JOHO	LPMD DEMAKIJO	LPMD PUNDUNGAN
Sumber Dana		-	-	-
Sumber Daya		-	+	-
Manusia				
Sarana Prasarana		+	+	+
Regulasi		-	+	+

Keterangan : (+) adalah Kekuatan/*Strength* dan Faktor Pendukung, (-) adalah Kelemahan/*Weakness* dan Faktor Penghambat  
*Sumber : diolah oleh peneliti*

Aspek sumber dana menjadi kelemahan bagi semua Lumbung Pangan Masyarakat Desa di Kabupaten Klaten. Ketersediaan dana di setiap Lumbung Pangan Masyarakat Desa belum memadai. Sumber dana tersebut untuk penguatan modal dalam kegiatan usaha dan tata kelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa agar tetap berjalan. Saat ini, setiap Lumbung Pangan Masyarakat Desa tidak mendapatkan dukungan anggaran dari pihak terkait. Kegiatan usaha ditopang dengan ketersediaan dana dari sisa hasil usaha yang saat ini berjalan. Untuk itu, aspek sumber dana ini menjadi faktor penghambat bagi tata Kelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa yang ada.

Sedangkan aspek sumber daya manusia ini menjadi kelemahan bagi 2 Lumbung Pangan Masyarakat Desa yaitu Lumbung Pangan Masyarakat Desa Joho dan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Pundungan. Ketersediaan sumber daya manusia di ke-2 Lumbung Pangan Masyarakat Desa kurang memadai dikarenakan ketidakmampuan Lumbung Pangan Masyarakat Desa untuk merekrut personil. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan ketersediaan personil dan ketersediaan biaya untuk memberikan insentif bagi personil. Adapun ketersediaan sumber daya manusia pada Lumbung Pangan Masyarakat Desa Demakijo Kecamatan Karangnangka telah cukup memadai. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pengelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa beserta struktur organisasi dan tugas setiap personil. Pengelola berasal dari Pengurus Gabungan Kelompok Petani desa setempat dan unsur masyarakat lainnya.

Adapun aspek sarana prasarana menjadi kekuatan bagi semua Lumbung Pangan Masyarakat Desa di Kabupaten Klaten. Sarana prasarana yang ada cukup memadai untuk produksi dan kegiatan usaha tata kelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa. Saat ini, setiap Lumbung Pangan Masyarakat Desa mendapatkan dukungan sarana prasarana dari pihak terkait. Kegiatan produksi dan usaha ditopang dengan ketersediaan sarana prasarana dari bantuan pemerintah. Untuk itu, aspek sarana prasarana ini menjadi faktor pendukung bagi tata Kelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa yang ada.

Aspek regulasi yang dirumuskan bagi Lumbung Pangan Masyarakat Desa yaitu Desa Demakijo menjadi kekuatan bagi tata Kelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa itu sendiri. Regulasi tata kelola khususnya adanya ketentuan aturan yaitu berupa pelaksanaan program dan pengorganisasian personil dapat menunjang ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kejelasan tugas bagi personil pengelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa menjadikan kegiatan dapat dilakukan secara baik antara lain tugas bidang distribusi/pemasaran dan bidang produksi. Tugas bidang produksi menyangkut tugas lapangan dan tugas proses. Sedangkan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Joho Kecamatan Prambanan dan Desa Pundungan Kecamatan Juwiring belum ada regulasi yang mengatur secara tegas tentang tugas setiap personil. Tata kelola dilakukan secara informal dan tugas kurang terspesifikasi. Hal tersebut berdampak pada kinerja yang kurang memadai dalam operasional Lumbung Pangan Masyarakat Desa itu sendiri.

Adapun analisis kondisi eksternal setiap Lumbung Pangan Masyarakat Desa di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 2. Kondisi Eksternal Lumbung Pangan Masyarakat Desa di Kabupaten Klaten

Aspek \ Desa	LPMD JOHO	LPMD DEMAKIJO	LPMD PUNDUNGAN
Sosial Politik	+	+	+
Sosial Ekonomi	+	+	+
Sosial Budaya	+	+	+
Teknologi	+	+	+

Keterangan : (+) adalah Peluang/*Opportunity* dan Faktor Pendukung, (-) adalah Ancaman/*Threat* dan Faktor Penghambat

Sumber : diolah oleh peneliti

Aspek sosial politik menyangkut adanya kebijakan publik yang bergulir dalam mendukung keberadaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa. Kebijakan tersebut berasal dari pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah daerah. Kebijakan pusat yang terkait dengan Lumbung Pangan Masyarakat Desa ditandai dengan adanya Lumbung Pangan Masyarakat Desa menjadi Program Prioritas bagi Pemerintah Pusat antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2025 serta Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Desa PDT Nomor 3 Tahun 2025 terkait mewajibkan alokasi minimal 20% dari total Dana Desa untuk mendukung kegiatan yang meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan masyarakat desa.

Adapun kebijakan lokal yaitu Pemerintah Desa pada 2 Lumbung Pangan Masyarakat Desa yaitu Desa Demakijo dan Desa Pundungan menjadi kekuatan bagi tata Kelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa itu sendiri. Tata aturan khususnya berupa Peraturan Desa/Keputusan Kepala Desa pada kedua desa mendukung proses produksi Lumbung Pangan Masyarakat Desa tersebut. Peraturan tersebut mengatur tentang kewajiban pemilik lahan pertanian desa yang dimiliki oleh perangkat desa untuk dijual kepada Lumbung Pangan Masyarakat Desa setempat. Selain itu, ada aturan terkait pengalokasian anggaran desa yaitu Dana Desa untuk mendukung secara tidak langsung untuk tata kelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa setempat berupa alokasi dana untuk ketahanan pangan. Sedangkan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Joho Kecamatan Prambanan belum secara tegas mengatur tentang kewajiban perangkat desa pemilik tanah kas desa agar dibeli oleh Lumbung Pangan Masyarakat Desa Joho. Namun, di Pemerintah Desa Joho juga telah membuat aturan untuk mengalokasikan anggaran desa untuk program ketahanan pangan.

Sedangkan aspek sosial ekonomi menyangkut tumbuhnya daya beli masyarakat. Adanya program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), meningkatnya layanan usaha kuliner oleh pelaku UMKM, permintaan produk oleh instansi swasta seperti Suara Muhammadiyah dan pemerintah menjadikan peluang akan meningkatnya kebutuhan akan produk atau beras yang diproduksi oleh seluruh Lumbung Pangan Masyarakat Desa. Selain itu, adanya program Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa dan gerai market place secara online juga menjadi peluang bagi akses pemasaran seluruh Lumbung Pangan Masyarakat Desa. Hal tersebut menjadi faktor pendukung bagi pengembangan tata kelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa di Kabupaten Klaten.

Aspek sosial budaya ini terkait tradisi yang ada ditengah masyarakat menyangkut proses produksi dan akses pasar akan permintaan produk yang dihasilkan oleh Lumbung Pangan Masyarakat Desa. Tradisi gotong royong yang tumbuh dimasyarakat pedesaan menjadi faktor pendukung dalam proses tata kelola produksi pertanian khususnya dalam mendukung operasional berjalannya Lumbung Pangan Masyarakat Desa. Partisipasi masyarakat khususnya stakeholder Lumbung Pangan Masyarakat Desa seperti petani yang tergabung dalam kelompok sangat tinggi. Selain itu, tradisi memanfaatkan konsumsi beras yang berkualitas yang dihasilkan oleh Lumbung Pangan Masyarakat Desa di wilayah pedesaan cukup tinggi. Hasil produksi beras melalui penggilingan padi Lumbung Pangan Masyarakat Desa dengan kualitas premium diminati

oleh sebagian besar masyarakat. Tradisi tersebut menjadi peluang atau faktor pendukung bagi tumbuh dan berkembangnya Lumbung Pangan Masyarakat Desa.

Adapun aspek teknologi menyangkut perkembangan, pemanfaatan teknologi untuk mendukung tata kelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa. Ketersediaan teknologi bagi seluruh Lumbung Pangan Masyarakat Desa telah memberikan peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi. Hal tersebut adanya sarana pengilingan padi atau RMU (Rice Milling Unit) yang memadai dan didukung dengan adanya alat penggilingan padi seperti mesin pemecah kulit (huller), mesin penyosoh (polisher), mesin pemisah beras (separator), mesin pembersih gabah (winower) dan mesin pengering (dryer). Selain itu, ketersediaan teknologi digital seperti smartphone telah dimanfaatkan oleh pengelola dalam akses pasar baik dalam pembelian gabah maupun penjualan hasil produk beras.

### **Model Pengembangan Tata Kelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa**

Berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal maka model pengembangan tata Kelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa di Kabupaten Klaten dapat dipetakan sebagai berikut :

Strategi pengembangan tata kelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa Joho Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten dapat dilakukan dengan *Pertama*, Peningkatan kapasitas produksi melalui pemanfaatan sarana prasarana produksi dan perkembangan teknologi, *Kedua*, Peningkatan kapasitas usaha melalui berbagai layanan antara lain layanan jasa penggilingan dan layanan minat khusus eduwisata tentang agro pedesaan, *Ketiga*, Pemberdayaan SDM melalui peningkatan kapasitas dalam pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa, *Keempat*, Advokasi kebijakan desa tentang daya dukung alokasi anggaran desa untuk tata kelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa dan kebijakan penjualan hasil panen lahan garapan perangkat desa kepada Lumbung Pangan Masyarakat Desa Joho serta perluasan keterserapan akses pasar produk untuk pemenuhan kebutuhan Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih dan lain sebagainya.

Adapun strategi pengembangan tata kelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa Demakijo Kecamatan Karangnangka Kabupaten Klaten dapat dilakukan dengan *Pertama*, Peningkatan kapasitas produksi melalui pemanfaatan sarana prasarana produksi dan perkembangan teknologi dengan perluasan layanan pembelian gabah hasil panen berasal dari desa lain, *Kedua*, Peningkatan kapasitas usaha melalui berbagai layanan antara lain layanan jasa penggilingan dan layanan minat khusus eduwisata tentang agro pedesaan, *Ketiga*, Advokasi kebijakan desa tentang daya dukung perluasan keterserapan akses pasar produk untuk pemenuhan kebutuhan Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih dan lain sebagainya. *Keempat*, Penguatan jaringan mitra *stakeholder* Lumbung Pangan Masyarakat Desa seperti Perguruan Tinggi, Swasta dan Pemerintah.

Sedangkan strategi pengembangan tata kelola Lumbung Pangan Masyarakat Desa Pundungan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten dapat dilakukan dengan *Pertama*, Operasionalisasi produksi melalui pemanfaatan sarana prasarana produksi dan perkembangan teknologi, *Kedua*, Peningkatan kapasitas usaha melalui berbagai layanan antara lain layanan jasa penggilingan dan layanan minat khusus eduwisata tentang agro pedesaan, *Ketiga*, Advokasi kebijakan desa tentang daya dukung perluasan keterserapan akses pasar produk untuk pemenuhan kebutuhan Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih dan lain sebagainya. *Keempat*, Penguatan jaringan mitra *stakeholder* Lumbung Pangan Masyarakat Desa seperti Perguruan Tinggi, Swasta dan Pemerintah.

Eduwisata merupakan pariwisata dengan menyajikan potensi-potensi setempat agar menjadi pendidikan. Tujuannya agar pengunjung mendapatkan pengalaman belajar secara langsung dari lokasi yang dikunjungi. Program pariwisata pendidikan dapat berupa ekowisata (*ecotourism*), wisata warisan (*heritage tourism*), wisata pedesaan (*rural/farm tourism*), wisata komunitas (*community tourism*), dan pertukaran siswa antar institusi (*student exchanges*). Perkembangan zaman dan peran ilmu pengetahuan berhubungan erat dengan kebudayaan





karena ilmu pengetahuan juga merupakan produk budaya (Sulyandari, Ari Kusuma; Zakiyah, Nurotuz; Lamo, Elna Hasanah; Putri et al., 2023). Wisata pertanian merupakan sajian wisata pendidikan yang bisa ditawarkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat. Karena kehidupan pertanian di desa menjadi menarik untuk diikuti oleh warga kota.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penyajian data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ketiga Pemerintah Desa belum memiliki tata kelola Lumbung Desa dengan baik. Setidaknya ada empat aspek sebagai indikator untuk melihat tata kelola Lumbung Desa, yakni: perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi. Dari aspek perencanaan, baru Desa Pundungan dan Desa Demakijo yang dilakukan. Dari segi kelembagaan, ketiga Desa baik Pundungan, Demakijo dan Joho belum melakukan dengan baik. Sisi pelaksanaan berupa pembelian gabah dan beras dari petani dan pemasaran beras ke pada umum baru dilakukan oleh Demakijo dan Joho. Sedangkan segi evaluasi dan monitoring telah dilakukan oleh ketiga desa, yakni Joho, Pundungan dan Demakijo. Kajian ini memiliki keterbatasan antara lain 1). keterbatasan akses terhadap informasi khususnya terkait informasi anggaran Lumbung Pangan Masyarakat Desa, 2). keterbatasan informasi data berupa dokumen menyangkut basis kebijakan.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya meliputi: 1). studi dengan informan yang beragam khususnya pemerintah desa dan petani 2). analisis peran *stakeholder* Lumbung Pangan Masyarakat Desa baik *stakeholder* primer dan sekunder 3). Dampak Lumbung Pangan Masyarakat Desa bagi kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bram, D. (2025). *Perkuat Kemandirian Pangan, Pemkab Klaten Bangun Lumbung Pangan di Tiga Desa*. Radarsolo.Jawapos.Com. <https://radarsolo.jawapos.com/klaten/841695268/perkuat-kemandirian-pangan-pemkab-klaten-bangun-lumbung-pangan-di-tiga-desa>
- Jawahir, G. R. K. E. (2024). *Krisis Pangan Global dan Tantangan yang Dihadapi Indonesia*. Www.Kompas.Com. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/01/17/193000382/krisis-pangan-global-dantantangan-yang-dihadapi-indonesia?page=3>.
- Lasminingrat, L. (2020). Pembangunan lumbung pangan nasional: strategi antisipasi krisis pangan indonesia. *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara*, 10(3), 243–260.
- Lestari, A. N. L. M. (2023). Efektivitas Program Lumbung Pangan dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kota Pekanbaru. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4).
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, A., Hestiawan, M. S., & Supyandi, D. (2016). Refleksi Paradigma Kedaulatan Pangan Di Indonesia: Studi Kasus Gerakan Pangan Lokal Di Flores Timur. *AGRICORE: Jurnal Agribisnis Dan Sosial Ekonomi Pertanian*, 1(2).
- Nurhadi, S. (2024). Peran Pemerintah Desa Sengon Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim*, 5(1).
- Pangan, B. K. (2019). *Buku Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah*.
- Sastraatmadja, E. (2022). *Kekuatan Lumbung Pangan Desa Bagi Ketahanan Pangan Indonesia*. Antara. <https://www.antaranews.com/berita/3262217/kekuatan-lumbung-pangan-desa-bagi-ketahanan-indonesia>
- Sudrajat; Purnama, Ignasius Loyola Setyawan; Wjaya, Heri; Rajab, M. (2025). Pengembangan Diversifikasi Produk Pangan Lokal untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Desa



Bleberan, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul. *Parikesit: Jurnal Pengabdian, Riset, Kreativitas, Inovasi, Dan Teknologi Tepat Guna*, 3(1).

Sujoni. (2024). *Kolaborasi Wujudkan Asta Cita Prabowo di Bidang Ketahanan Pangan Nasional*. Sindonews.Com. <https://nasional.sindonews.com/read/1490959/15/kolaborasi-wujudkan-asta-cita-prabowo-di-bidang-ketahanan-pangan-nasional-1732021866>

Sulyandari, Ari Kusuma; Zakiyah, Nurotuz; Lamo, Elna Hasanah; Putri, M., Asyifa; Firmansyah, Heru; Junshionamas, Fortunando Textonic; Kurnia, M., & Ayu. (2023). Edutourism sebagai upaya meningkatkan potensi desa wisata. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19613>

Sunarsih; Syahyuti; Wahyuni, Sri; K Sejati, Wahyuning; Azis, M. (2015). Kedaulatan Pangan Sebagai Basis untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional Food Sovereignty as the Basis to Realize National Food Security. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 33(2), 95–109.